

## PRRI SUPPRESSION OPERATION IN SUNGAI PAGAR (1958-1961)

### Operasi Penumpasan PRRI di Sungai Pagar (1958-1961)

Cindy Lorenza<sup>1a(\*)</sup>, Bunari<sup>2b</sup>, Asyul Fikri<sup>3c</sup>

<sup>123</sup>Universitas Riau

<sup>a</sup>[cindylorenza1062@student.unri.ac.id](mailto:cindylorenza1062@student.unri.ac.id)

<sup>b</sup>[bunari@lecturer.unri.ac.id](mailto:bunari@lecturer.unri.ac.id)

<sup>c</sup>[asyul.fikri@lecture.unri.ac.id](mailto:asyul.fikri@lecture.unri.ac.id)

(\*) Corresponding Author

[cindylorenza1062@student.unri.ac.id](mailto:cindylorenza1062@student.unri.ac.id)

**How to Cite:** Cindy Lorenza. (2024). Operasi Penumpasan PRRI di Sungai Pagar (1958-1961) doi: [10.36526/js.v3i2.3819](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.3819)

Received: 18-04-2024

Revised : 11-04-2024

Accepted: 25-06-2024

#### Keywords:

PRRI,  
Sungai Pagar,  
Suppression

#### Abstract

The establishment of PRRI was a reaction to the leadership of President Soekarno and to create a more decentralized government in Indonesia. The first joint operation known as Operation Tegas led by Lieutenant Colonel (Inf) Kaharuddin Nasution in Pekanbaru. The research problem was the destruction process of PRRI in Sungai Pagar, Kampar Kiri Hilir in 1958-1961. This research aims to (1) know the background of the emergence of PRRI in Riau (2) to know the PRRI movement that occurred in Sungai Pagar 1958-1961 (3) to know the actions in an effort to suppress PRRI in Sungai Pagar by the Republican Army. This research is a library research study. The method used in this research is qualitative historical methods covering four stages including: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. As for the location of the research that is in Sungai Pagar Village, Kampar Kiri Hilir District, Riau Province. The result showed that the destruction of PRRI in Sungai Pagar was based on the involvement of US CIA who provided weapons and drop it at Pekanbaru and Sungai Pagar village which is approximately 30km from Pekanbaru became one of the areas used by PRRI troops in resistance to the Republican army.

## PENDAHULUAN

Pergolakan daerah merupakan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu untuk memperjuangkan kepentingan tertentu seperti ekonomi, kepentingan ras/suku, serta kepentingan di latar belakang oleh agama. Disamping itu, pergolakan daerah dapat juga muncul dan terbentuk sebagai akibat dari kesalahan politik dan kesulitan pembangunan, yang mendorong lahirnya gejolak dan pemberontakan suatu daerah yang menginginkan pelepasan diri dari pemerintahan pusat.

Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia masihlah harus menghadapi tantangan dan permasalahan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Masalah ancaman dari dalam negeri atau konflik internal juga bisa berbentuk kekerasan senjata dan gerakan-gerakan separatisme yang dilakukan oleh daerah-daerah dan cenderungnya merupakan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Gerakan separatis yang ditempuh oleh sekelompok orang juga dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas nasional dan keutuhan Negara. Suatu Negara yang berdaulat harusnya memiliki atribut penting yang dibenarkan prinsip hukum demi dapat mempertahankan kedaulatannya.

Sejatinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara, pemerintah harus mampu menciptakan stabilitas agar seluruh komponen tidak terganggu oleh hal-hal destruktif dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Tidak adanya stabilitas politik antara golongan partai dan banyaknya perbedaan arah pandang politik serta perebutan kekuasaan oleh para elit politik, menyebabkan teralihnya perhatian pemerintahan pusat

terhadap persoalan di bidang ekonomi, pembangunan nasional serta sosial dan budaya.

Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng saat itu menyiarkan sebuah ultimatum yang menuntut untuk menunjukan Muhammad Hatta dan sultan Yogyakarta sebagai format kabinet baru yang akan dibentuk. Namun, ultimatum itu ditolak dengan tegas oleh Kabinet Djuanda yang bahkan memerintahkan penangkapan kepada tokoh-tokoh Dewan Banteng dan pemberhentian tidak hormat kepada militer yang berhubungan dengan Dewan Banteng (Kahin, 2008).

Ketegangan antara pemerintahan pusat dan daerah akhirnya meledak ketika Ahmad Husein mendeklarasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Kegiatan para aktivis PRRI yang mulai dianggap berbahaya bagi kesatuan NKRI akhirnya menimbulkan ketegangan politik yang memanas secara nasional. Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) akhirnya dikerahkan untuk melakukan upaya-upaya penumpasan terhadap pergerakan PRRI di Sumatera melalui operasi lintas udara dan operasi komando yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Nuralam, 2020).

Ancaman militer sendiri adalah suatu bentuk ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Untuk menanganinya dilakukan upaya penumpasan yang diambil dan dilakukan militer atau sipil, untuk menghilangkan gerakan pemberontakan yang melawan sebuah pemerintahan seperti yang dilakukan oleh para pasukan Resimen Komando.

Negara berdaulat yang memiliki atribut pokok akan dibenarkan untuk melakukan tindakan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatannya termasuk untuk mempertahankan keutuhan wilayah (Suryokusumo, 2003). Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan, militer pun juga sangat berhubungan dengan keadaan di suatu negara. Karena itu, dibentuknya tenaga militer bukan hanya untuk meraih kemerdekaan tetapi juga untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatannya. Tapi juga penting untuk diperhitungkan bahwa aksi pemberontakan merupakan aksi suatu produk yang lahir, terbentuk dan tidak bisa mudah hilang dari unsur-unsur sosial-masyarakat. Pemberontakan nyatanya adalah suatu hal organik yang lahir dan muncul di kehidupan kemasyarakatan sehingga komponen penting untuk menghindarinya adalah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Persiapan pasukan TNI dalam menghadapi para aktivis PRRI termasuk yang paling serius dan terbesar dalam dekade tahun 50-an. Dimana seluruh kekuatan bersenjata melibatkan kekuatan inti dari masing-masing matra. Baik melalui darat, laut, udara bahkan intelejen sekalipun dikerahkan guna melumpuhkan pusat perlawanan PRRI yang terjadi di daerah Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Selatan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah sebagai metode utama. Metode sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dan hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan. Metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi ulang masa lampau secara sistematis dengan melakukan pengumpulan, mengevaluasi, verifikasi dan mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Nasir, 2003).

Dalam penelitian metode sejarah terdapat empat langkah-langkah, yaitu: 1). Heuristik, 2). Verifikasi, 3). Interpretasi dan 4). Historiografi. Untuk memperoleh data yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran dari permasalahan secara menyeluruh, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, teknik kepustakaan, dan wawancara.

## PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Munculnya PRRI di Riau

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang sering disebut PRRI sesungguhnya menjadi bentuk ungkapan kekecewaan terhadap sistem pemerintahan pusat yang mengalami ketidakmerataan. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia berawal terbentuk dari gagasan pembentukan Dewan Banteng yang terdiri dari perwira aktif dan pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah. Dewan Banteng sendiri diisi oleh tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Maluddin Simbolon, dan beberapa tokoh

militer lain sebagai petinggi dan penggerakannya.

Bentuk kekecewaan itu akhirnya memuncak hingga Dewan Banteng melakukan suatu pergerakan untuk membentuk sebuah kabinet pemerintahan sendiri dan mengeluarkan sebuah ultimatum tentang gerakan Dewan Perjuangan pada tanggal 10 Februari 1958 di Padang. Dan kemudian berlanjut dengan mengeluarkan ultimatum "Piagam Perdjoengan menjelamatkan Negara Repoeblik Indonesia" yang berisikan 8 tuntutan kepada pemerintahan pusat yaitu: 1). Tuntutan kepada Kabinet Djuanda untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden, 2). Menunjuk Moh.Hatta dan Hamengkubuwono untuk membentuk kabinet nasional, 3). Menunjuk Hatta- Hamengkubowono demi mencegah perpecahan, 4). Menuntut kepada dewan rakyat untuk memberikan kesempatan Hatta-Hamengkubowono untuk membentuk suatu kabinet nasional, 5). Meminta presiden Soekarno untuk kembali berpegang pada kedudukannya secara konstitusional, 6). Akan mengambil suatu kebijakan sendiri apabila tuntutan- tuntutan tersebut tidak dipenuhi. 7). Membebaskan kewajiban untuk tunduk dan taat kepada Ir.Soekarno sebagai kepala Negara, jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak dipenuhi, 8). Menuntut agar kabinet Djuanda tidak menghalangi pengumuman tersebut (Mestika dan Chaniago, 2001).

Berdirinya PRRI juga merupakan reaksi terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno yang condong memihak pada blok komunis, hal ini dapat diketahui sebab keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) semenjak pemilu tahun 1955 telah menunjukkan eksistensinya di Indonesia sebagai partai terbesar dan menilai Soekarno telah mengkhianati konstitusi dengan membubarkan konstituante.

Gagasan untuk melawan Soekarno yang dituduh semakin berpihak pada PKI pun semakin menguat ketika para tokoh militer dan politisi sipil mengadakan rapat rahasia di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Dari segi politik, dukungan terhadap PRRI mendapat sambutan positif dari kalangan pemuka adat, alim ulama dan kaum cendekiawan lainnya. Dewan Perjuangan kemudian membentuk kabinet baru serta membuat mata uang baru yang menunjukkan bahwa PRRI telah berani menciptakan suatu pemerintahan tandingan untuk melawan pemerintahan yang sah (Leirissa, 1997).

Upaya itu ditolak secara keras oleh pemerintah pusat sehingga meluncurkan suatu operasi penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Berdasarkan surat keputusan bersama disusunlah komando operasi gabungan dibawah kepemimpinan Jendral A.H Nasution yang terdiri dari gabungan TNI darat, laut dan udara untuk menumpas PRRI di Sumatera.

Operasi gabungan pertama dikenal dengan nama Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letnan Kolonen (Inf) Kaharuddin Nasution, wakil komandan I (udara) Letkol Wiradinata, dan wakil komandan II (laut) Mayor Indra Soebagio dengan mengepung daerah Riau daratan tepatnya di Pekanbaru.

Dalam surat kabar *Alkmaarsche Courant* terbitan tahun 1958, pasukan ini berhasil masuk ke Pekanbaru menggunakan jalur darat melewati daerah Bengkalis dan menggunakan jalur udara di sekitar lapangan udara Simpang Tiga (yang kini dikenal sebagai Bandara Sultan Syarif Kasim III) dengan melakukan terjun payung. Pengepungan kota Pekanbaru didasari atas adanya potensi keterlibatan agen-agen CIA milik Amerika Serikat dalam memberikan bantuan pasokan senjata kepada pasukan PRRI yang diedarkan di PT perminyakan Caltex.

Kota Pekanbaru diutamakan untuk berhasil berada dalam kendali TNI karena hal ini dikhawatirkan jika seandainya Pekanbaru tidak dapat dipertahankan lebih dulu, pasukan PRRI bisa saja dapat menguasai dan menduduki ladang minyak milik Caltex. Dimana saat itu kurang lebih 20 truk yang memuat kebutuhan logistik persenjataan dan uang untuk para pasukan PRRI.

Sejak bulan Februari 1958, CIA mulai mendrop ribuan pucuk senjata api lengkap beserta amunisi dan granat seperti M1 Garand, M1 carbine para, Recoiless, pengebom B-26 Invader, AT-II Kansan hingga Super Bazooka (Mestika, 2009). Pengiriman pertama dilakukan melalui jalur laut di pelabuhan Teluk Bayur, yang kemudian di jemput oleh kapal- kapal kecil. Pengiriman selanjutnya juga dilakukan melalui jalur udara di pangkalan udara Tabing dan pangkalan udara Simpang Tiga saat ini pada tanggal 12 Maret 1958 menggunakan pesawat angkut berjenis C-54 yang di kendarai oleh Amerika Serikat

Selain pengepungan di darat, hal serupa juga datang dari gugus pasukan laut yang dapat dengan cepat merebut dermaga di sepanjang pesisir Sungai Siak. Pengepungan yang telah berhasil dilakukan oleh pasukan TNI, membuat posisi wilayah Riau yang awal mulanya strategis karena berada cukup dekat dan berbatasan dengan jalur lalu lintas laut internasional menjadi menutup kemungkinan pasukan PRRI untuk

dapat melarikan diri melewati Selat Malaka.

## 2. Kondisi Wilayah Sungai Pagar

Didudukinya kota Pekanbaru oleh pasukan TNI membuat situasi kian memanas. tak lain karena pasukan TNI didukung oleh jumlah tentara yang banyak serta memiliki kendaraan mumpuni yang membuat pasukan PRRI kewalahan. Pasukan PRRI yang saat itu hanya memiliki kekuatan puluhan ribu pasukan reguler terdiri dari kelompok sipil, pemuda kampung, dan pelajar.

Karena kekuatan PRRI yang dengan mudah dapat didobrak, akhirnya anggota PRRI banyak yang memilih mundur ke pedalaman dan memilih melancarkan perang gerilya sebagai upaya perlawanan terhadap pasukan TNI. Para tokoh pemimpin PRRI di Riau seperti Letnan Kolonel Pudjo Widodo dan Mayor Said Syafaat akhirnya melakukan mobilisasi pasukan dan mendirikan basis operasional di beberapa daerah salah satunya berada di Kampar Kiri.

Desa Sungai Pagar tidak secara spesifik tercatat dalam sejarah sebagai pusat peristiwa PRRI. Namun, daerah tersebut nyatanya juga terpengaruh oleh peristiwa itu sebagai bagian dari jalur perjalanan dalam operasi penumpasan yang dilakukan. Desa Sungai Pagar yang berjarak lebih kurang 30 km dari Pekanbaru menjadi salah satu kawasan yang digunakan pasukan PRRI dalam melanjutkan perlawanan terhadap tentara pusat.

Letak wilayah desa Sungai Pagar yang dilewati oleh sungai kampar kanan yang lebar sehingga dibutuhkan upaya penyebrangan untuk dapat melewatinya, karena satu-satunya akses untuk menuju desa itu hanyalah menyebrangi sungai melewati jembatan atau dengan menggunakan sampan/rakit.

Keadaan wilayah desa Sungai Pagar yang dikelilingi oleh rawa dan sungai menjadikan desa tersebut sebagai tempat pelarian yang strategis untuk pasukan PRRI karena dapat dijadikan benteng alami yang dapat mempermudah pasukan PRRI melakukan mobilisasi dan taktik perang gerilya.

Kehidupan masyarakat Sungai Pagar sebelum konflik cukup berjalan baik dan masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan hasil perkebunannya. Namun, pada awal pergolakan, kehidupan masyarakat daerah Sungai Pagar mulai tidak aman. Hal ini dikarenakan pergerakan gerilya yang dilakukan di hutan-hutan sekitar sehingga keamanan sedikit terganggu. Saat terjadinya konflik PRRI masyarakat harus menjaga pembicaraan. Tidak boleh terlihat memihak diantara dua pihak yang berkonflik. masyarakat Sungai Pagar juga tentunya dilanda rasa takut dan memiliki perasaan tidak aman.

## 3. Upaya TNI dalam Menumpas PRRI di Sungai Pagar

Regu kompi B yang saat itu dipimpin oleh Kopral Suprpto ditugaskan untuk memperluas posko pengejaran ketika melihat adanya aktivitas pergerakan pasukan PRRI yang sedang menyusun pertahanan di desa bagian tenggara Pekanbaru. Pada tanggal 21 Maret 1958, para pasukan Banteng Raiders I akhirnya bergerak mengejar pasukan musuh yang menuju ke desa Sungai Pagar, Kabupaten Kampar Kiri Hilir.

Setibanya di Sungai Pagar, hal utama yang dilakukan oleh TNI adalah melakukan pemantauan dan pengintaian karena adanya kewaspadaan terhadap pasukan PRRI yang menyamar sebagai warga setempat. Mengutip dari surat kabar Merdeka terbitan 20 Maret 1958 menjelaskan bahwa PRRI juga turut membentuk tentara sukarela yang terbentuk dari masyarakat sekitar dan diandalkan oleh pihak PRRI sebagai tenaga bantuan.

Para tentara sukarela ini juga turut dilatih layaknya tentara reguler dengan bermodalkan senjata. Tidak kurang dari 200 tentara PRRI beserta alat-alatnya telah menggabungkan diri meskipun terlihat sekali sebagian dari mereka masih belum mahir dalam mempergunakan senjata. Prajurit sukarela ini pada umumnya di dominasi oleh pemuda dan kepala keluarga yang berada di usia produktif.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat setempat dengan pergerakan PRRI, bahkan tak sedikit masyarakat lain yang turut merasakan situasi tidak kondusif yang terjadi di Sungai Pagar. Banyak masyarakat yang ditangkap atas rasa kecurigaan antara kedua belah pihak, pengegedahan rumah ke rumah, bahkan ada yang mendapatkan kekerasan fisik.

Selain mengamankan prajurit bantuan milik PRRI, proses penumpasan juga di upayakan semaksimal mungkin dengan melakukan penelusuran dan pengegedahan menyeluruh hingga ke dalam desa.

Regu bantuan pun dihadirkan dengan membawa suplai amunisi dan kendaraan jenis jeep untuk mengangkut personil pasukan Banteng Raiders I selama masa operasi.

Diperkirakan sebanyak 1 kompi personel melakukan penelusuran di Sungai Pagar. Satu kompi pasukan infanteri tersebut juga membangun pos dan berjaga di pos tersebut dengan melakukan patroli secara rutin. Setelah melakukan penyisiran selama kurang lebih 4 hari desa Sungai Pagar akhirnya dinyatakan bersih dari musuh dan pasukan BR-1 akhirnya melanjutkan pengejarannya hingga ke Lipatkain. Hingga pada tanggal 3 Maret tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan himbauan kepada pasukan PRRI untuk dapat menyerah dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan menjanjikan amnesti dan abolisi bagi prajurit PRRI-Permesta sebelum Oktober 1961.

Usainya perang yang terjadi antara PRRI dan tentara pemerintah pusat ditandai dengan menyerahnya Ahmad Husain sebagai pimpinan tertinggi dari PRRI secara umum, baik yang terjadi di Sumatera Tengah maupun Sumatera Barat. Berdasarkan catatan resmi Kodam 17 Agustus, secara menyeluruh setidaknya ada sebanyak 6.115 pasukan PRRI yang tewas dan sebanyak 627 yang hilang. Sedangkan dari pihak Kodam III/17 Agustus ada sebanyak 1.031 pasukan yang tewas dengan rincian 329 tentara, 56 brimob, 67 OPR, 579 pegawai sipil dan rakyat.

Dampak signifikan yang sampai saat ini dapat dirasakan akibat adanya pergerakan PRRI ini yaitu terbentuknya otonomi daerah. Sumatra Tengah kini terbagi menjadi tiga daerah (Sumatera Barat, Jambi dan Riau) dan mendapatkan hak untuk menjadi provinsi serta mengurus daerahnya masing-masing. Hal ini tentunya mempermudah perhatian atas nasib-nasib rakyat daerah dan pemenuhan kebutuhan agar aksesibilitas masyarakat dapat dibangun secara menyeluruh baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi, produksi serta distribusi.

Begitu juga yang terjadi di Sungai Pagar yang saat ini telah berstatus sebagai kelurahan dan menjadi daerah administratif. Secara moril, masyarakat saat itu dihantui perasaan takut karena tuduhan keberpihakan kepada salah satu pihak, baik itu sebagai anggota PRRI sendiri maupun Tentara Republik. Selain itu, secara sosial peristiwa ini membuat lahirnya stigma buruk kepada masyarakat Sumatra yang dicap sebagai pemberontak, menyebabkan kemerosotan mental untuk generasi-generasi setelahnya khususnya kesulitan yang dialami untuk masuk kedalam tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Latarbelakang munculnya PRRI di Riau

Berdirinya PRRI merupakan reaksi terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno serta untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersifat desentralisasi di Indonesia. Upaya itu ditolak secara keras oleh pemerintah pusat sehingga meluncurkan suatu operasi penumpasan dibawah kepemimpinan Jendral A.H Nasution yang terdiri dari gabungan TNI darat, laut dan udara. Operasi gabungan pertama dikenal dengan nama Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letnan Kolonen (Inf) Kaharuddin Nasution, wakil komandan I (udara) Letkol Wiriadinata, dan wakil komandan II (laut) Mayor Indra Soebagio dengan mengepung daerah Riau daratan tepatnya di Pekanbaru. Pengepungan kota Pekanbaru itu didasari atas adanya keterlibatan agen-agen CIA milik Amerika Serikat yang memberikan bantuan senjata kepada pasukan PRRI yang diedarkan di PT perminyakan Caltex. Dan dikhawatirkan jika seandainya Pekanbaru tidak dapat dipertahankan lebih dulu, pasukan PRRI bisa saja dapat menguasai dan menduduki ladang minyak milik Caltex.

#### 2. Kondisi Wilayah Sungai Pagar

Desa Sungai Pagar yang berjarak lebih kurang 30 km dari Pekanbaru menjadi salah satu kawasan yang digunakan pasukan PRRI dalam melanjutkan perlawanan terhadap tentara pusat. Keadaan wilayah desa Sungai Pagar yang dikelilingi oleh rawa dan sungai menjadikan desa tersebut sebagai tempat pelarian yang strategis untuk pasukan PRRI karena dapat dijadikan benteng alami yang dapat mempermudah pasukan PRRI melakukan mobilisasi dan taktik perang gerilya.

#### 3. Upaya TNI dalam menumpas PRRI di Sungai Pagar

Pasukan Banteng Raiders I akhirnya bergerak mengejar pasukan musuh yang menuju ke desa Sungai Pagar, Kabupaten Kampar Kiri Hilir. Hal utama yang dilakukan oleh TNI adalah melakukan pemantauan dan

pengintaian karena adanya kewaspadaan terhadap pasukan PRRI yang menyamar sebagai warga setempat. Proses penumpasan di upayakan semaksimal mungkin dengan melakukan penelusuran dan pengeledahan menyeluruh hingga ke dalam desa. Diperkirakan sebanyak 1 kompi personel melakukan penelusuran di Sungai Pagar dengan membangun pos dan berjaga di pos tersebut dengan melakukan patroli secara rutin. Selama kurang lebih 4 hari desa Sungai Pagar akhirnya dinyatakan bersih dari musuh dan pasukan BR-1 akhirnya melanjutkan pengejarannya hingga ke Lipatkain yang masih sama-sama berada dalam satu wilayah ke- administrasian,

### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan fakta- fakta dan pengalaman berharga terkait peristiwa PRRI di Sungai Pagar ini. Untuk itu, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis pribadi juga khalayak banyak. Sehubungan dengan fakta yang telah penulis gali, maka penulis hendak memberikan beberapa saran.

1. Bagi penulis dan pembaca diharapkan mampu lebih meningkatkan rasa nasionalisme dan solidaritas atas persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga tidak adanya perpecahan.
2. Bagi dinas-dinas kesejarahan khususnya pada provinsi Riau diharapkan mampu menjaga nilai-nilai historis atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai pedoman nilai luhur untuk generasi yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kahin, A. (2008). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Leirissa, R. Z. (1997). *PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mestika Zed, H. C. (2001). *Perlawanan Seorang Pejuang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuralam, R. (2020). Resimen Komando Angkatan Darat (RPKAD) Dalam Operasi Militer di Indonesia Tahun 1959-1966. *repository.upi.edu*, hlm. 7.
- Suryokusumo, S. (2003). Ancaman Kekuatan Militer Dari Luar Menurut Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Zed, M. (2009). *Keterlibatan CIA Dalam Kasus PRRI*. Padang: Pusat Kajian Sosial-Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Zed, M., & Chaniago, H. (2001). *Perlawanan Seorang Pejuang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.